

# Adaptasi Sirkulasi Patron dalam Implementasi Sentralisme Demokratik Partai Komunis Vietnam dalam Kongres pada era “*Doi Moi*”

HILWAN GIVARI\*

Akper Sumber Waras

Jl. Kiai Tapa No. 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440

Indonesia

Email: g2givari@gmail.com

## ABSTRAK

Kebertahanan negara satu partai pimpinan Partai Komunis Vietnam (PKV) pada era *Doi Moi* (*Đổi Mới* atau reformasi ekonomi) biasanya dijelaskan oleh para ilmuwan politik secara struktural dan kultural melalui teori ‘*performance-based legitimacy*’ atau pemikiran nasionalisme dari Ho Chi Minh. Kedua penjelasan itu menilai bahwa PKV memiliki ciri-ciri akuntabilitas politik yang sama dengan partai komunis lain yang berkuasa di dunia dengan sifatnya yang singular dan *top-down* birokratis, namun belum menyentuh fitur institusional negara-partai komunis seperti prinsip sentralisme demokratik. Dengan menerapkan sejumlah teori/konsep alternatif dan hasil penelitian kontemporer seputar institusionalisasi PKV dan pelaksanaan Kongres partai yang dilakukan pada era *Doi Moi*, tulisan ini melihat bahwa PKV mampu melaksanakan nilai-nilai akuntabilitas vertikal dan horizontal prinsip sentralisme demokratik secara lebih konsekuen dalam Kongres partai sebagai lembaga tertinggi partainya. Hal itu diraih melalui beberapa strategi seperti (1) keberadaan troika yang terdifusi, (2) penguatan Komite Sentral (Central Committee atau CC) di atas Politbiro, (3) peningkatan kompetisi dalam pemilihan anggota CC, serta (4) rivalitas blok voting dalam CC. Tulisan ini juga membuktikan secara kualitatif berdasarkan studi literatur yang digunakan keberadaan variabel konseptual ‘adaptasi sirkulasi patron’ sebagai penggerak dilaksanakannya prinsip akuntabilitas tersebut. Temuan tersebut membuktikan bahwa kebertahanan PKV tidak bisa disamakan dengan partai komunis di negara lain karena PKV terlihat mampu secara adaptif mengakomodasi tuntutan reformasi dan kepentingan para elite patron yang semakin pragmatis.

Kata kunci: sentralisme demokratik, institusionalisasi Partai Komunis, kebertahanan sistem politik satu partai, Vietnam.

## ABSTRACT

The survival of the one-party leadership of the Communist Party of Vietnam (PKV) in the era of *Doi Moi* (*Đổi Mới* or economic reform) is usually explained by political scientists by using structural and cultural approaches in the form of ‘*performance-based legitimacy*’ theory or Ho Chi Minh’s ideological thinking. The two explanations underline that the PKV has the same characteristics of political accountability as the other communist parties in power in the world with a singular and bureaucratic top-down nature. However, the two approaches have not touched the institutional features of communist parties such as the principles of democratic centralism. By applying a number of al-

---

\* Penulis adalah Pengajar di Akper Sumber Waras.

ternative theories/concepts and contemporary research about the institutionalization of PKV and the exercise of party Congress conducted in the *Doi Moi* era, this paper argues that PKV is able to implement aspects of vertical and horizontal accountability of democratic centralism in party Congress as the highest institution within the party. This was achieved through several strategies such as (1) the application of diffused troika, (2) the strengthening of the Central Committee (CC) above the Politburo, (3) the increasing competition in the selection of the CC members, and (4) the implementation of voting block rivalry in the CC. This paper also proves based on qualitative research that apply the conceptual variable “patron circulation adaptation” as a driver of implementation of the principle of accountability. These findings prove that PKV survival cannot be paralleled with communist parties in other countries because the party is seen as being able to adaptively accommodate the demands of reform and the interests of increasingly pragmatic patron elites.

Keywords: democratic centralism, Communist Party institutionalization, the persistence of a one-party system, Vietnam

DOI: <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.192>

## PENDAHULUAN

Kebijakan Partai Komunis Vietnam (PKV) memunculkan *Doi Moi*<sup>1</sup> (*Đổi Mới* atau reformasi ekonomi) sering kali dianggap sebagai solusi untuk mempertahankan eksistensi negara satu partai yang dipimpinnya. Ketika peperangan dan sistem perekonomian terpusat tak lagi diberlakukan sebagai legitimasi kekuasaannya, para ilmuwan biasanya menjelaskan fenomena keberintahan negara komunis Vietnam dengan dua model penjelasan yang bersifat ‘struktural’ dan ‘kultural’. Jika penjelasan struktural yang didasari atas teori ‘*performance-based legitimacy*’ melandaskan alasannya pada masih mampunya PKV menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat (White 2005, 463), penjelasan kultural yang didasari pemikiran nasionalisme Ho Chi Minh biasanya mengatakan bahwa sampai saat ini seluruh bangsa Viet masih percaya bahwa “PKV adalah partai yang bekerja sepenuh hati untuk kelas, untuk rakyat, untuk tanah air” (Phuc 2013). Namun, walaupun mampu menjelaskan keberintahan kekuasaan PKV, keduanya mengabaikan hal-hal riil terkait seluk beluk dinamika institusi politik yang justru penting untuk disimak, yaitu prinsip sentralisme demokratik.

---

1 Secara harfiah, *Doi Moi* berarti renovasi. Dalam konteks ini, *Doi Moi* dimaknai sebagai sebuah kebijakan yang dimunculkan PKV untuk ‘merenovasi’ sistem ekonomi negara dari *planned economy* menjadi *socialist-oriented market economy* yang bercirikan pada moda produksi industri manufaktur dan penanaman modal asing yang disertai dengan regulasi negara yang tinggi atas pasar dan BUMN (Schellhorn 1992, 240).

Penjelasan mengapa kajian mengenai sentralisme demokratik kurang menjadi analisis utama para ilmuwan dapat dilihat dari bias teori/konsep utama mengenai kehidupan negara Vietnam. Konsep ‘*mono-organizationalism socialism*’ dan ‘*bureaucratic polity*’ misalnya menjelaskan bahwa sistem institusi politik yang dibangun oleh PKV selama ini bersifat monolitik (Thayer 2016, 2) dan tidak mengindahkan kontrol sosial dari masyarakat (Potter 1993, 101).<sup>2</sup> Kedua konsep tersebut menganggap cara PKV mengimplementasikan prinsip sentralisme demokratik sama seperti Lenin (Brown 2009) yang membangun institusi politik di Soviet dengan sifat birokrasi yang terpusat dan *top-down*. Sehingga, alih-alih mendapatkan gambaran adaptif PKV dalam merespon tantangan politik baru yang muncul pasca *Doi Moi* dicetuskan, ide-ide penelitian yang dikembangkan dari kedua konsep semacam ini menurut Kierkvliet (2001) biasanya hanya akan menjerumuskan upaya para analis pada sebuah kondisi yang disebut *parkinson state* (Koh 2001, 534-536). Konsep *parkinson state* merupakan sebuah kondisi terkurasnya kekuatan aparatur negara dengan beberapa gejala seperti pemecatan fungsionaris partai, pengabaian masyarakat atas keputusan-keputusan partai, inefisiensi pemerintahan, dan lain sebagainya (Wallace 2012, 6).

Padahal, dalam sejumlah literatur alternatif penjelasan sentralisme demokratik Vietnam yang berbeda masih dapat ditemukan. Pemikiran Gramsci (1971), Kabele (2008), dan Dimitrov (2013) – yang sifatnya universal – dapat ditelusuri lebih jauh untuk memahami bahwa ternyata sentralisme demokratik menjadi alat pengontrol akuntabilitas secara vertikal dan horizontal demi terciptanya stabilitas politik. Sementara itu, dari hasil-hasil studi mengenai Kongres PKV setiap lima tahun sejak *Doi Moi* yang dilakukan oleh Vuving (2010), Vu (2014), Malesky (2009) dan Schuler & Ostwald (2016) menemukan bahwa nilai-nilai akuntabilitas vertikal dan horizontal tersebut tidak pernah abai diimplementasikan oleh Lembaga tertinggi PKV seperti Kongres. Selain bisa dilihat dari keberadaan sistem difusi troika yang menerapkan *check and*

---

<sup>2</sup> Konsep ‘*bureaucratic polity*’ dari Potter mengandaikan bahwa sifat pengambilan keputusan di negara satu partai Vietnam bersifat *top-down* hierarkis dan mengabaikan peran kontrol dari masyarakat (Porter 1993, 101).

*balances*, beberapa indikator lain yang bisa menunjukkannya adalah kemunculan lembaga Komite Sentral (CC) PKV yang kuat di atas Politburo, keberadaan rivalitas blok voting dalam CC, dan kompetitifnya pemilihan anggota CC.

Namun, untuk membaca fenomena sentralisme demokratik di dalam PKV secara lebih utuh, pertanyaan mengapa PKV bisa melaksanakan sentralisme demokratik dalam tiap Kongresnya pada era *Doi Moi* perlu didalami lebih lanjut. Dengan menggunakan metode kualitatif-historis, tulisan ini mengajukan penjelasan bahwa adaptasi sirkulasi patron dalam institusionalisasi PKV dapat menjelaskan pelaksanaan sentralisme demokratik di dalam tubuh PKV. Variabel tersebut terkait dengan dinamika relasi patronase antarelite PKV dalam rangka menghadapi sejumlah tuntutan akuntabilitas yang muncul ketika mengubah perekonomian dari terpusat menjadi '*socialist market economy*' sejak tahun 1986.

Berdasarkan uraian di atas, apabila keberthanan negara komunis satu partai Vietnam pada era *Doi Moi* hendak dijelaskan, analisisnya pun tidak dapat didasarkan atas perspektif pemikiran sentralisme demokratik yang monolitik. Alasannya sederhana karena secara historis PKV mengimplementasikan prinsip tersebut secara berbeda dari rezim komunisme lain di dunia yang membangun institusi politiknya dengan sifatnya yang birokratis, terpusat dan *top-down*. Akibatnya, alih-alih mendapatkan gambaran adaptif PKV dalam merespon tantangan politik baru yang muncul setelah *Doi Moi* dicetuskan, analisis yang dikembangkan justru kurang mampu menjelaskan keadaan yang riil. Untuk itu, tulisan ini menawarkan perspektif baru untuk menganalisis keberthanan PKV dengan mengajukan dua variabel penting, yaitu: (1) implementasi akuntabilitas dalam prinsip sentralisme demokratik dalam arena yang vital bagi PKV seperti Kongres partai, dan (2) adaptasi sirkulasi patron dalam institusionalisasi PKV.

Agar kedua variabel tersebut dapat terurai lebih detail, tulisan ini berargumen bahwa keberhasilan PKV melaksanakan nilai-nilai akuntabilitas horizontal-vertikal dalam prinsip sentralisme demokratik dalam Kongres pada era *Doi Moi*, yang ditandai oleh keberadaan sistem difusi

troika; penguatan CC PKV di atas Politbiro; keberadaan rivalitas blok voting; dan kompetitifnya pemilihan anggota CC, disebabkan oleh adaptasi proses sirkulasi patron dalam PKV. Adaptasi itu dilakukan untuk menghadapi tuntutan perbaikan akuntabilitas yang muncul dalam rangka menghadapi reformasi dan kepentingan para elite patron yang semakin pragmatis.

Dalam mendiskusikan kebertahanan PKV sesuai dengan argumen tersebut, penjelasan dalam tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian *pertama* mendiskusikan kerangka teori untuk menjelaskan karakteristik kedua variabel yang dikaji serta *'standing position'* tulisan ini dalam diskursus keilmuan politik yang menyoal mengenai fenomena kebertahanan negara komunis satu partai di Vietnam. Sementara itu, bagian *kedua* memfokuskan diri pada pembahasan keberadaan proses adaptasi sirkulasi patron di dalam pelaksanaan prinsip sentralisme demokratik PKV dalam Kongres-kongres pada era *Doi Moi*. Untuk mendapatkan cita rasa adaptasi sirkulasi patron di dalamnya, selain akan menguraikan cara PKV melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut melalui keempat indikator yang telah disebut di atas, tulisan ini juga memberikan analisis historis terkait dinamika politik antarkelompok patron yang melatarbelakangi kemunculan dan perkembangan dinamika sentralisme demokratik dalam Kongres sejak *Doi Moi* dicetuskan.

## STUDI LITERATUR

Untuk membantu menjelaskan fenomena yang diangkat, tulisan ini menggunakan konsep, hasil pemikiran, maupun teori yang dikemukakan para ahli terkait fenomena yang diangkat. Hanya saja jika diamati kedudukan masing-masing wacana, sejumlah konsep atau teori tersebut terlihat memiliki pertentangan secara paradigmatis. Seperti yang dapat dilihat di bawah, pemikiran Gramsci yang berposisi di kutub strukturalis terlihat hadir dalam tulisan bersama dengan konsep-konsep akuntabilitas yang datang dari kubu pluralis seperti oleh Larry Diamond dan Leonardo Morlino. Padahal, asumsi filosofi politik keduanya berbeda.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Jika kaum pluralis beranggapan bahwa kesejahteraan masyarakat akan muncul dengan sendirinya ketika unit-unit sosial yang secara natural akan bisa menciptakan sendiri diversifikasi kerja

Tanpa bermaksud untuk memperlihatkan bentuk pertentangan tersebut, penggunaan konsep-konsep dari kedua paradigma tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan operasional agar dapat mengklasifikasi secara tepat karakteristik masing-masing variabel yang dikaji.

Hal ini menjadi penting karena apabila tulisan ini hanya fokus pada konsep-konsep atau teori dari salah satu paradigma saja maka dipastikan tidak akan dapat menghasilkan klaim keilmuan beserta argumentasinya secara utuh. Sebagai contoh, **pertama**, jika tulisan ini ingin konsisten dalam menggunakan konsep-konsep kaum strukturalis Marxis maka tulisan ini akan kehilangan pijakan teoretis mengenai fenomena patronase. Sebab – jika dilihat dari berbagai literatur strukturalis Marxis yang membahas tentang Kongres PKV – tulisan mereka tampak terlalu berfokus pada kebijakan-kebijakan institusional dan kerap abai terhadap fenomena berbasis kultur seperti patronase.<sup>4</sup> **Kedua**, sementara itu, jika hanya konsep-konsep pluralis yang digunakan, kiranya bisa dipastikan bahwa tulisan ini akan setuju dengan pendapat para ilmuwan yang selama ini menganggap PKV mengimplementasikan prinsip ‘sentralisme demokratik’ sama seperti ‘sentralisme birokratik’ (Thayer 2016; Potter 1993).

Sebagai salah satu fitur institusional penting yang dimiliki oleh negara komunis, sentralisme demokratik sejatinya mengakui keberadaan nilai-nilai partikularitas (Brown 2009, 107). Namun demikian dalam perjalanannya, prinsip yang pertama kali dicetuskan oleh Bastian von Schweitzer tersebut,<sup>5</sup> sering kali dimaknai di dalam diskusi-diskusi secara peyoratif menjadi ‘sentralisme birokratik’ akibat tafsir Lenin (Nappalos 2013, 17) – ketika mendalangi Partai Buruh Sosial

---

yang kompetitif. Sementara itu, asumsi filosofis kaum strukturalis Marxis terlihat bertentangan. Karena mereka beranggapan bahwa sistem kompetisi ideal yang diasumsikan kaum pluralis tidak pernah bisa menciptakan keadilan di masyarakat maka negara mesti campur tangan ke dalam sistem ekonomi. Lihat Harris (2015, 60) terkait perdebatan aspek ekonomi-politik.

4 Menurut Gainsborough (2007, 5) kelompok yang sering diistilahkan dalam kelompok ‘*krem-linology*’ atau ‘*Ba Dinh-ology*’ (bahasa Vietnam) sering kali menghasilkan literatur yang terbatas seperti itu karena kendala teknis semisal kesulitan memperoleh akses untuk mendapatkan informasi dalam kongres partai yang sedang dikaji.

5 Ide sentralisme demokratik pertama kali diperkenalkan oleh Von Schweitzer (Presiden Asosiasi Pekerja Jerman /Allgemeiner Deutscher Arbeiter-Verein, ADAV dan anggota parlemen konfederasi Jerman Utara/ Reichstag 1867-1871, (Bottomore ed. 2001, 134).

Demokrat Rusia (RSDV) – menjadi: ”konsep pemerintahan pabrik di bawah kepemimpinan seseorang yang melakukan militerisasi terhadap buruh.” Jika dilihat dari penelusuran historis yang dilakukan Nappalos (2013), Lenin jelas bukanlah satu-satunya orang yang mengembangkan sentralisme demokratik. Banyak tokoh lain, seperti Bordiga (1926) yang menafsirkannya kemudian menjadi sentralisme organik, atau Gramsci yang pemikirannya dijadikan rujukan dalam tulisan ini. Semisal dengan mengutip kalimatnya (Gramsci 1971, 189-190) berikut:

Sentralisme demokratik menawarkan formula yang elastis. Ia dapat hidup selama diinterpretasi dan diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan. Ia memiliki dorongan untuk mengejar apa yang identik dalam keberagaman, dan di sisi lain, mencari apa yang berbeda hingga bahkan bertentangan dalam kesatuan, dalam rangka mengorganisasi dan menghubungkan secara erat apa yang mirip, tetapi dalam hal pengorganisan, ia muncul secara praktikal dan induktif berdasarkan kebutuhan, dan bukan sebagai hasil proses abstraksi rasional, deduktif seperti yang dicontohkan oleh seorang intelektual.

Kita mungkin akan memahami bahwa menurut Gramsci, sentralisme demokratik tidaklah sama dengan tafsiran Lenin atau Bordiga. Jika Lenin dan Bordiga sama-sama menganggap sentralisme demokratik sebagai prinsip yang monolitik-birokratis, Gramsci justru memahaminya sebagai prinsip yang mesti mengakui pandangan plural dari seluruh unit yang diwakilinya. Maka jika logika berpikir Gramsci tersebut digunakan, kiranya dapat diduga bahwa penjelasan mengenai fenomena kebertahanan sebuah rezim komunis akan terlihat menjadi lebih realistis, sebab partai tidak perlu menciptakan institusi kepartaian yang sama persis dan terkontrol dari pusat hingga pelosok desa. Selain karena memiliki biaya sosial yang terlalu mahal, keberadaannya juga niscaya tidak akan pernah mampu menghasilkan kemampuan beradaptasi partai yang baik dalam menghadapi beragam dinamika politik – semisal rivalitas antarelite – yang sudah pasti akan terjadi.

Seperti yang dapat dibaca dari kutipan tulisan Kabele (2008) tentang pengaruh sentralisme demokratik terhadap stabilitas politik rezim ko-

munisme, bisa dilihat bahwa mampu tidaknya partai komunis mempertahankan rezim yang dipimpin, sebenarnya dapat diukur dari cara mereka mengatasi dua tekanan yang sifatnya saling bertentangan, yaitu: (1) tekanan vertikal untuk menciptakan unifikasi dalam sistem politik, dan (2) tekanan horizontal yang datang dari kepentingan masyarakat yang diniscayakan plural sifatnya. Selain kongruen dengan tafsiran Gramsci (1971), penjelasan Kabele mengenai dua tekanan akuntabilitas dalam sentralisme demokratik yang dinamainya pemerintahan demokratik (akuntabel kepada kedaulatan rakyat/horizontal), dan administrasi birokratik (loyal kepada birokrasi partai/vertikal) itu juga tampak selaras dengan struktur hierarki partai komunis yang biasanya menempatkan lembaga representatif (perwakilan) seperti Kongres dan Komite Sentral di puncak tertinggi pengambilan keputusannya.

Hanya saja jika penjelasan Kabele itu disandingkan dengan beberapa literatur yang ditinjau, penjelasan tersebut sudah tidak dapat dipergunakan sebagai landasan teoretis. Selain karena secara praktis mengabaikan keberadaan variabel patronase, pemaknaan akuntabilitas horizontal dan vertikal yang diberikan ilmuwan strukturalis Marxis ini juga menyertakan urusan-urusan hubungan partai dengan masyarakat yang tidak dikaji. Oleh karena itu, tulisan ini kemudian meminjam beberapa definisi ilmuwan pluralis seperti Henisz (2000, 1) yang mendefinisikan akuntabilitas horizontal sebagai “sebuah batasan institusional terhadap kekuasaan kepemimpinan”, atau Diamond dan Morlino (2004, 25) yang mengartikannya menjadi “sebuah pertanggungjawaban seorang petugas pemerintahan yang dapat membuatnya merespon selain dengan perintah dan ketaatan”. Selain itu, tulisan ini menggunakan definisi akuntabilitas vertikal Moncrieffe (1998, 393) yang diartikannya sebagai “batasan yang membuat pemimpin dapat merespon konstituen dalam aksi dan kebijakan tertentu yang diambil”.

Dengan bantuan pijakan definisi-definisi tersebut, tulisan pun kemudian memaknai akuntabilitas sentralisme demokratik yang diimplementasi PKV dalam tulisan ini sebagai sebuah mekanisme *check and balance* (horizontal) dan kontrol *bottom-up* (vertikal) yang dimiliki para



elite yang terlibat dalam badan-badan partai terpenting seperti CC dan Politbiro. Sehingga, selain unit analisis menjadi hanya terbatas pada keberadaan sejumlah elite yang termasuk ke dalam dua lembaga tadi, definisi operasional tersebut juga dapat melihat fenomena ketiadaan dominasi oleh satu kelompok dalam PKV akibat implementasi nilai-nilai akuntabilitas vertikal dan horizontal sentralisme demokratik di dalamnya. Agar dapat lebih meyakinkan tentang signifikan tidaknya penggunaan definisi operasional tersebut, terdapat beberapa literatur penelitian terkait topik yang mungkin bisa dipelajari lebih lanjut.

*Pertama*, hasil studi Abrami, Malesky, dan Zheng (2011) mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap keberlanjutan negara satu partai Vietnam. Melalui hasil penelitian yang mempergunakan model komparatif ini, mereka memperlihatkan soal perbedaan karakteristik institusional yang dimiliki oleh Vietnam dengan negara komunis lain seperti Cina. Dalam hal ini, mereka memberikan penjelasan mengenai keberadaan penerapan nilai-nilai akuntabilitas yang mendasari hadirnya perbedaan tersebut. Meski tidak mengaitkannya sama sekali dengan prinsip sentralisme demokratik, klaim utama penelitian mereka jelas mengatakan bahwa keberadaan akuntabilitas yang dijalankan oleh PKV tampak mempengaruhi keseimbangan relasi kuasa dan pemerataan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh provinsinya (Abrami, Malesky, dan Zheng 2011, 402). Dengan itu, akan terlihat bahwa cara PKV menerapkan sentralisme demokratik pada era *Doi Moi* tidaklah sama dengan yang selama ini dijelaskan para ilmuwan sebagai sentralisme birokratis. Dengan membawa serta uraian mengenai keberadaan sistem difusi troika, proses saling veto antarlembaga tinggi, dan kompetisi antarcalon anggota CC, Abrami, Malesky, dan Zheng menunjukkan bahwa proses-proses yang terkait sentralisme demokratik, selalu diperlihatkan oleh PKV agar dapat menghasilkan *check and balance* dan kontrol *bottom-up* dalam institusi negara komunis yang dibangun (Dimitrov 2013, 256-254).

*Kedua*, hasil studi Abuza (2002), Gainsborough (2007), Schuler & Ostwald (2016), dan Hung (2016) mengenai keberadaan gejala sirkulasi patron dalam tiap Kongres PKV pada era *Doi Moi*. Jika dibaca secara seksama, pada intinya tulisan mereka semua hendak mengatakan

bahwa berbagai kebijakan yang dihasilkan dalam setiap Kongres PKV pasca-*Doi Moi* merupakan bagian dari sirkulasi patronase yang sudah mendarah daging dalam politik di Vietnam. Hal ini dapat dilihat melalui contoh kasus ketidakterpilihan calon Sekretaris Jenderal Partai Lee Kha Pieu (seorang kader teknokrat berkarir cemerlang dari kalangan militer pada Kongres ke-9 tahun 2002), dan Nguyen Tan Dung (Perdana Menteri populis yang diklaim reformis pada Kongres ke-11 dan 12 tahun 2011 dan 2016). Dalam hal ini, Abuza (2002), dan Schuler & Ostwald (2016) mengetengahkan gejala sirkulasi patron yang terjadi dalam Kongres dengan membawa serta daya jaring klientelisme seorang elite di PKV berbekal jabatan birokrasi. Sementara penjelasan Gainsborough (2007) dan Hung (2016, 5-7) tampak lebih dinamis lagi karena ikut menyertakan intrik saling dukung dan jegal antarkelompok patronase yang terdapat di PKV ketika pelaksanaan Kongres pada masa *Doi Moi* terjadi. Hal tersebut dapat terlihat dengan mengamati kasus rivalitas dua kekuatan jejaring patronase tingkat nasional pada masa pra-Kongres ke-10 tahun 2006, dan pergantian tampuk kepemimpinan pemberantasan korupsi di Vietnam dari tangan Perdana Menteri ke Sekjen pada masa 2011-2016.

Seperti yang disampaikan pada bagian sebelumnya, sebenarnya sudah cukup banyak tulisan-tulisan yang membahas mengenai keberintahan negara komunis. Namun, bagi ilmuwan seperti Klyvas (1999), beragam teori politik yang membahas fenomena keberintahan negara komunis sering kali dianggap bias karena menjadikan sistem multi-partai sebagai acuan idealnya. Menurut Klyvas, bias ini muncul karena pencetus teori-teori tersebut tidak memeriksa terlebih dahulu sejumlah modalitas partikular yang bersifat historis menyangkut proses institusionalisasi seperti: (1) dinamika internal dalam sistem satu partai, (2) asal-usul dan pertumbuhannya, (3) hubungan yang dimiliki dengan pola dan pemilahan masyarakat, serta (4) pilihan-pilihan strategi yang diambil para elite politiknya untuk menghadapi masa krisis (Klyvas 1999, 328). Sekumpulan teori yang dikemukakan biasanya mengklaim secara sekuensial bahwa setiap negara komunis yang masih hadir saat ini; tidak hanya akan hidup mengikuti pola-pola evolusi institusional

yang umum – yaitu lahir, berkembang, membusuk, lalu kemudian bubar (ibid.) – tetapi juga mengalami proses pembubaran lebih cepat. Lagi pula, partai tunggal yang menguasai sistem politik, tidak pernah mampu mengadaptasikan diri menghadapi perubahan universal. Menurut Klyvas (1999, 330), diktator proletariat yang mereka jalankan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, sudah tidak relevan lagi untuk diperjuangkan.

Selain itu, dengan mengamati penjelasan Dimitrov (2013) yang mengutarakan klaim bahwa “di balik represi, kebertahanan rezim komunis merupakan sebuah fungsi dari adaptasi institusional yang berkelanjutan”, sepertinya kita akan menemukan cara membaca fenomena kebertahanan negara-negara komunis yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan komparatif berbasis kontribusi pemikiran dari banyak kalangan ilmuwan, Dimitrov tidak hanya mampu memberikan penjelasan mengenai alasan kebertahanan yang unik untuk masing-masing negara seperti Kuba, Korea Utara, Cina, Laos, dan terutama Vietnam yang menjadi fokus dalam penelitian ini, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai keberadaan sejumlah varian adaptasi yang mendasari kebertahanan negara-negara tersebut. Variasi tersebut misalnya: (1) mereformasi ideologi dengan jalan memperkuat nilai-nilai nasionalisme, (2) mereformasi ekonomi dengan membuka peluang bagi sektor privat, (3) menciptakan perlindungan yang berarti bagi kelas-kelas pekerja, dan terakhir – yang lebih diarahkan penulis menjadi tolok ukur penjelas dari kebertahanan negara satu partai Vietnam dalam tulisan ini – yaitu (4) membangun akuntabilitas horizontal dan vertikal dalam sistem politik yang dibangunnya (Dimitrov 2013, 6).

Sementara itu, Chabal (1986) menjelaskan bahwa akuntabilitas politik tidak hanya bersemayam dalam konstitusi dan mekanisme institusi yang secara formal menahan nafsu penguasa, namun juga merupakan bagian dari relasi patron klien yang ada dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Melalui penjelasan tersebut, sepertinya untuk memaknai secara utuh pelaksanaan akuntabilitas politik, seorang ilmuwan tidak bisa hanya berkuat pada aturan atau perangkat institusi tanpa mendalami benar mengenai sistem perilaku politis para unit-unit yang

bermain dalamnya. Dengan pertimbangan tersebut, tulisan ini menggunakan definisi relasi patron-klien Scott (1972, 92) sebagai konsep politik untuk menjelaskan mekanisme permainan elite di balik penerapan sentralisme demokratik PKV dalam tiap Kongresnya, yakni:

sebagai sebuah ikatan *dyadic* khusus yang menyertakan secara instrumental hubungan pertemanan luas antara seseorang berstatus sosial ekonomi lebih tinggi (patron) yang menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan proteksi atau keuntungan, atau keduanya, bagi seorang yang berstatus lebih rendah (klien), yang secara resiprokal memberikan dukungan dan bantuan, termasuk jasa pribadinya, kepada patron.

Konsep ini juga akan mampu mendefinisikan keberadaan dinamika dalam Kongres yang sejatinya berbasiskan pada perebutan sumber daya antarpatron yang sifatnya personal ketimbang ideologis. Melalui tambahan penjelasan yang diberikan atas definisi tersebut bahwa “secara klasik di Asia Tenggara, para patron biasanya lebih menggantungkan diri pada akses atau kepemimpinan yang dimilikinya dalam kantor-kantor pemerintahan dibandingkan dengan status keturunan atau kepemilikan lahan” (Scott 1972, 101), kerangka berpikir tulisan ini akan menjadi lebih bersifat partikular karena mampu mencerap relasi kuasa yang terjadi di Asia Tenggara – khususnya Vietnam.

Sebab, jika kita memerhatikan proses institusionalisasi PKV dari lahir sampai saat ini, sebutan ‘patron’ seperti yang dijelaskan dalam definisi Scott di atas sepertinya cocok untuk mendefinisikan keberadaan para elite PKV. Mereka selama ini dikenal tidak hanya memiliki kuasa berdasarkan relasi kader senior-junior dengan sebutan ‘*protéger*’–‘*protégé*’ (*mentor-mentee*), tetapi juga turut mengembangkan relasi klientelisme dengan memanfaatkan unsur-unsur selain jabatan kepartaian dari mulai keluarga, tanah pertanian, hingga kepemilikan perusahaan privat yang didapatinya melalui pemberlakuan *Doi Moi* (Gainsborough 2010, 13-17).

Dengan menyoroti keberadaan sirkulasi patronase politik dalam tubuh PKV dari masa kelahirannya sampai sekarang, ilmuwan seperti Vu

(2014) bahkan berargumen lebih jauh. Menurut Vu, ramalan para pakar demokratisasi mengenai kejatuhan rezim komunis Vietnam pasca-*Doi Moi* jelas tidak dapat diterima. Penjelasan para ilmuwan arus utama tampak lebih suka melihat dinamika relasi patronase yang berlangsung di dalam PKV sebagai sumber pembusukan (*decaying*) semata tanpa terlebih dahulu memerhatikan beberapa dampak yang dihasilkan oleh perubahan-perubahan politik historis seperti peperangan, bantuan modal asing, hingga tuntutan reformasi yang muncul pada era *Doi Moi*. Padahal jelas, jika kita memerhatikan penjelasan Vu (2014, 36) mengenai tahap evolusi kelembagaan PKV pada masa *Doi Moi*, yang diistilahkannya dengan ‘reformasi dan keberlanjutan pembusukan’, aktivitas patronase yang dimainkan di antara para elite terkadang bisa menjadi sesuatu yang bermakna positif bagi eksistensi partai melalui proses-proses reformasi yang ikut terangkut bersamanya.<sup>6</sup>

Dengan demikian, alih-alih melihatnya sebagai sebuah organisasi patrimonial yang biasa memusatkan kuasa di tangan satu orang atau kelompok, keberadaan PKV secara evolutif pada saat mencetuskan *Doi Moi* pada tahun 1986, justru lebih dapat dilihat sebagai jalinan kerja sama antara elite-elite partai yang ‘loose’ di tingkat pusat. Namun jalinan itu mengakar kuat di tingkat lokal sebagai konsekuensi realistik yang dimunculkan PKV untuk dapat mendapati relasi klientelisme dari masyarakat dalam jumlah besar (Vu 2014). Selain itu, jalinan itu juga terjadi baik dalam masa pergerakan nasionalisme yang direpresentasikan oleh keberadaan perang Indochina I dan II, era 1940 sampai tercipta unifikasi, serta keberlanjutannya pada masa *Doi Moi* melalui dihidirkannya sentra-sentra ekonomi baru di tingkat daerah seperti *New Economic Zones* (NEZ).<sup>7</sup>

---

6 Menurut Tuong Vu, tahapan institusionalisasi PKV dari kelahiran sampai sekarang dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu: (1) perluasan dan institusionalisasi (1930-1960); (2) perkembangan dan pembusukan (1970-86); dan (3) reformasi dan ‘keberlanjutan pembusukan’ (1986-sekarang) (Vu 2014, 39-40).

7 *New Economic Zones* merupakan konsep kawasan ekonomi khusus yang pertama kali diberikan kepada kota Ho Chi Minh untuk dapat mengintegrasikan berbagai kawasan penghasil agrikultur di selatan seperti beras, kopi, teh, kapas, tembakau, dan lain sebagainya untuk di ekspor ke luar melalui pelabuhan di kota tersebut. Untuk mempermudah proses ini, PKV memberikan kepada kawasan selatan untuk menjalankan model perekonomian *joint state-private* dan swasta (Riedel dan Turley 1999, 152).

Dengan kondisi yang amat dinamis seperti itu, jika analisis terkait sirkulasi patron ini diamati dari penelitian Vuving (2010) yang spesifik mencermati gejala peningkatan sikap pragmatisme pada diri elite PKV pada era *Doi Moi*, akan didapatkan pemahaman yang lebih detail lagi. Hal tersebut menyebabkan runtuhnya klasifikasi para elite PKV - yang biasa dibagi oleh para ilmuwan politik - menjadi kelompok 'konservatif' dan 'reformis' dengan latar perbedaan ideologis. Selain itu, peningkatan sikap pragmatisme di kalangan elite PKV yang terjadi pada era *Doi Moi* juga dinilai memiliki efek 'janus' bagi eksistensi partai seperti yang dikemukakan Vu dalam istilah 'reformasi dan keberlanjutan pembusukan' tadi (Vuving 2010).

Jika dengan mengangkat contoh-contoh kasus, seperti penerapan siklus kebijakan ekonomi (konservatif pada saat krisis, liberal pada masa pertumbuhan) dan persoalan hubungan luar negeri Vietnam dengan dunia luar, sikap pragmatisme tersebut dinilai Vuving dapat secara positif memecah kebuntuan rivalitas ideologis demi kemenangan citra positif PKV di mata masyarakat (Vuving 2010, 367-389). Namun demikian di sisi negatif, keberadaannya juga secara riil ikut berkontribusi dalam menumbuhkembangkan aktivitas perburuan rente para elite yang melemahkan legitimasi partai. Dengan biasa menyembunyikan diri di balik isu-isu ekonomi seperti peningkatan sektor privat secara reformis, pragmatisme politik juga kerap muncul di balik upaya para elite PKV ketika hendak menguatkan *state owned enterprise* secara konservatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya (Vuving 2010, 374).

#### ADAPTASI SIRKULASI PATRON DALAM INSTITUSIONALISASI PARTAI KOMUNIS VIETNAM

Sebelum menguraikan lebih detail mengenai keberadaan proses adaptasi sirkulasi patron dalam pelaksanaan sentralisme demokrasi dalam Kongres pada periode *Doi Moi*, tulisan ini akan menyajikan terlebih dahulu data-data kuantitatif dan kualitatif umum terkait Kongres untuk menggambarkan kelumit dinamika politik yang terjadi di dalamnya (Tabel 1 dan 2).

Tabel 1  
Data Kuantitatif Kongres PKV sejak *Doi Moi* (1986-2016)

Kongres Ke-	Tahun	Total Kader	Delegasi Kongres	Hasil Pemilihan		
				Jumlah Anggota CC	Jumlah Anggota Politbiro	Sekjen Terpilih
6	1986	2.109.613	1.129	173	13	Nguyen Van Linh
7	1991	2.155.022	1.176	146	17	Do Muoi
8	1996	2.130.000	1.198	170	19	Do Muoi (s.d 1997) Lee Kha Phieu (1997-2001)
9	2001	2.479.719	1.168	150	15	Nong Duc Manh
10	2006	3.100.000	1.176	181	15	Nong Duc Manh
11	2011	3.600.000	1.337	200	16	Nguyen Phu Trong
12	2016	4.480.707	1.510	200	19	Nguyen Phu Trong

Sumber: Telah diolah kembali dari Bui (2014, 9-10)

Tabel 2  
Data Kualitatif terkait Sentralisme Demokratik dalam Kongres PKV sejak *Doi Moi* (1986-2016)

Kongres Ke-	Tahun	Keputusan Terkait Sentralisme Demokratik
6	1986	Pemberlakuan sistem ekonomi privat untuk seluruh kawasan Vietnam Menaikkan keterwakilan provinsi dalam keanggotaan CC menjadi 41% Pembatasan usia delegasi Kongres (Provinsi: 40-49 tahun, Kabupaten/Kota 30-39 tahun)
7	1991	Pendirian Politbiro Standing Comitee (PBSC) untuk menjadi lembaga pengambilan keputusan tertinggi di PKV (Vietnam) yang diisi oleh tiga orang Troika Vietnam dan dua kader Politbiro Pergantian Du Moui sebagai Sekjen oleh Le Kha Phieu melalui mekanisme antarkongres, yaitu pada Sidang Pleno ke-7
8	1996	Perubahan tugas Politbiro Standing Committee (PBSC) menjadi hanya badan pelaksana urusan internal partai yang tidak diisi oleh Troika Vietnam
9	2001	Penolakan CC terhadap usulan Politbiro untuk mencalonkan Le Kha Phieu sebagai Sekjen Pembubaran Lembaga PBSC Penciptaan mekanisme kompetisi pemilihan anggota CC melalui: (1) menetapkan batas usia kandidat (baru: maksimal 55 tahun, <i>incumbent</i> : maksimal 60 tahun), (2) memperbolehkan kandidat rekomendasi CC <i>incumbent</i> mengundurkan diri, (3) memperbolehkan kandidat anggota Kongres mengajukan diri
10	2006	Keterpilihan Sekjen dari etnik minoritas 'Tay' yang biasanya berasal dari etnik mayoritas 'Viet' Pemberian wewenang pemberantasan korupsi di tangan PM dan pengawasannya di bawah Sekjen
11	2011	Pelanggaran batas usia Sekjen yang maksimal 55 tahun (Nguyen Phu Trong terpilih pertama kali sebagai Sekjen di usia 67 tahun) Pencabutan kontrol pemberantasan korupsi dari tangan PM menjadi langsung diambil alih oleh Sekjen (Sidang Pleno V) Pemberian peluang kepada tiap peserta Kongres untuk mendominasi dirinya sebagai calon anggota CC dengan persetujuan presidium Kongres
12	2016	Nguyen Phu Trong terpilih sebagai Sekjen dari posisi <i>incumbent</i> pada usia 72 tahun

Dari berbagai sumber. Data diolah oleh penulis.

### *Skema Difusi Troika Vietnam*

Jika dilihat dari kacamata prinsip sentralisme demokratik Vietnam yang muncul sejak pencetusan *Doi Moi*, keberadaan troika (*set of three*) yang terdiri dari Sekretaris Jenderal Partai, Presiden, dan Perdana Menteri (PM) bisa dianggap sebagai tiga orang pemimpin yang merepresentasikan keberadaan sistem pendelegasian kewenangan politik secara vertikal maupun pemisahan kekuasaan secara horizontal. Dengan memperhitungkan hierarki struktur kelembagaan dan format pemerinkatan yang ada di dalam komite eksekutif (Politbiro PKV), seorang Sekretaris Jenderal yang diberikan pangkat nomor satu dalam Politbiro sudah jelas mesti dianggap berposisi lebih tinggi dibandingkan Presiden dan PM yang biasanya dipilih dari orang-orang dengan peringkat Politbiro di bawahnya.

Kendati demikian, bukan berarti Sekretaris Jenderal PKV bisa mengatur kewenangan yang dimiliki Presiden dan PM sesukanya. Sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1 di bawah, sistem politik Vietnam mengenal keberadaan National Assembly (NA) sebagai lembaga tertinggi negara yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk memilih Presiden dan PM dari para anggotanya. Maka dengan demikian, keberadaan Presiden dan PM menjadi terdifusi dari struktur keorganisasian partai karena lebih harus terlihat memegang peranan sebagai mandataris NA daripada mandataris partai. Jika Presiden diberikan kewenangan oleh NA untuk melaksanakan tugas-tugas kepala negara maka PM diberikan tugas oleh NA untuk melaksanakan pemerintahan sehari-hari dengan mengepalai menteri-menteri yang juga dipilih dari para anggota NA (*Socialist Republic of Vietnam Government Portal* 2016).

Seperti juga yang telah disinggung pada bagian pendahuluan, sebenarnya skema difusi troika yang saat ini relatif ajek dimainkan tidak dapat semata-mata didasari oleh perubahan politik besar seperti berakhirnya peperangan. Namun, hal itu juga terkait dengan tantar bagi PKV untuk menghadirkan format pelaksanaan pemerintahan ;... lebih akuntabel guna menghindari proses sentralisasi kekuasaan hanya di tangan satu kelompok. Sebab, bukan tidak mungkin kekacauan yang



terjadi pada masa pasca-peperangan ketika Le Duan menjabat sebagai Sekjen selama 26 tahun (1960-1986) akan terjadi kembali. Pada masa PKV masih menggunakan model troika Soviet<sup>8</sup>, kondisi yang tercipta darinya bukan kesolidan di antara elite, melainkan justru maraknya aktivitas pembangkangan para patron daerah yang mengarah pada terjadinya kegagalan negara atau *'failed state'*.<sup>9</sup> Pada saat menghadapi tantangan resesi ekonomi pascaperang yang terjadi, perilaku para elite patron dari daerah pascaunifikasi 1975 justru tidak bersatu di bawah komando Le Duan dan Le Duc Tho yang menyetir secara patrimonial kedudukan Presiden dan Perdana Menteri.<sup>10</sup> Para elite ini justru tetap terlihat terpecah berdasarkan sentimen regional seperti halnya yang diperlihatkan mereka pada masa gerilya peperangan Indochina II. Dengan demikian, betapa pun pemerintah pada saat ini telah menciptakan program lima tahunan melalui Kongres 1976 dan 1982 untuk mengaktifkan kembali pabrik-pabrik hasil nasionalisasi 1954 (utara) dan 1975 (selatan) dan produksi pertanian kolektif di tingkat akar rumput. Namun pada kenyataannya, hasil yang dicapai adalah nihil.<sup>11</sup>

---

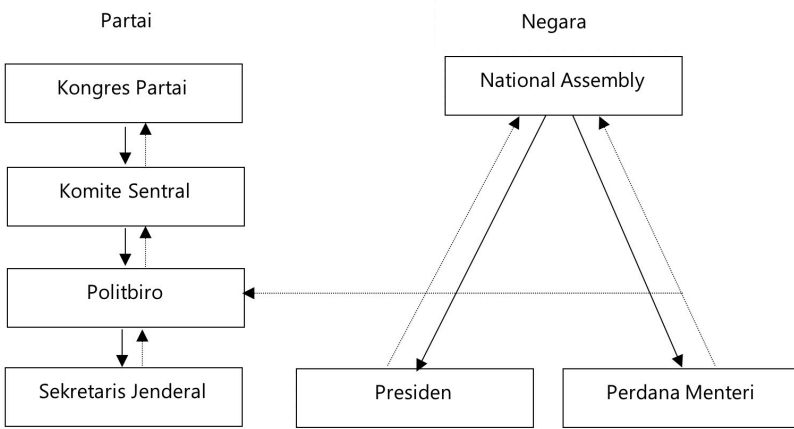
8 Pada awal masa unifikasi di bawah kepemimpinan Le Duan, sistem politik Vietnam dijalankan berdasarkan konstitusi 1980. Dalam UUD tersebut, posisi Sekjen secara aktif dapat mengatur secara langsung kebijakan Presiden dan PM melalui kedudukan keduanya sebagai pemimpin dewan negara, dan dewan kementerian. Dalam *Vietnam's 1980 Constitution* (Law and Legal Forum 2011).

9 Keberadaan situasi resesi pascaperang ditandai oleh hancurnya 6 kota-kota industri, 28 dari 30 kota-kota provinsi, 96 dari 116 kota-kota distrik, dan 4,000 dari 5.788 kota-kota tingkat kecamatan (Cima (ed.) 1987).

10 Menurut Canh (1983, 71-72), format akuntabilitas sentralisme demokratik Vietnam pada era ini hanya memunculkan dua nama pada puncak kekuasaan, yaitu Le Duan dan Le Duc Tho. Dengan jabatannya sebagai Sekjen dan Ketua Komite Organisasi Partai Laodong sejak Kongres partai ke-3 tahun 1960, mereka memasukkan anggota keluarga ke dalam jabatan-jabatan strategis. Bila Le Duan terlihat jelas dari keberadaan (1) anaknya sebagai menteri dalam negeri dan kepala polisi rahasia RDV, (2) besannya sebagai Menteri perdagangan, dan (3) saudara-saudara iparnya sebagai Kepala Badan propaganda Partai dan Kepala Institut Studi Marxist-Leninist Nguyen Ai Quoc, maka jejaring nepotisme Le Duc Tho terlihat dari keberadaan ketiga saudaranya yang menjabat masing menjadi Ketua People's Committee (DPRD) Kota Saigon, Menteri Transportasi dan Komunikasi, dan Deputy Perdana Menteri.

11 Dalam Kongres partai IV tahun 1976, PKV menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 13-14% dengan rincian 16-18 % pertumbuhan datang dari sektor industri, dan 8-10 % dari sektor agrikultur. Hanya saja dalam Kongres V tahun 1982, PKV terlihat mengoreksi target-target tersebut karena pencapaian pertumbuhan yang didapat hanya sekitar 0.069% di bidang agrikultur, dan 0.06% di bidang industri (Cima (ed.) 1987).

Gambar 1  
Skema difusi troika dalam sistem negara satu partai Vietnam pada era Doi Moi



Keterangan skema: garis panah putus-putus menandakan lembaga keanggotaan asal. Sementara itu garis panah tidak putus menandakan arah pendelegasian kewenangan.

Sumber: Abrami, Malesky,dan Zheng (2013, 246)

Jika diamati dari model perekonomiannya, Vietnam menggunakan sistem distribusi fiskal berbasis daerah<sup>12</sup> yang memunculkan ‘raja-raja komunis kecil’ daerah yang memiliki kekuasaan secara *de facto* atas massa gerilya dan lumbung perekonomian negara sejak periode 1940-an.<sup>13</sup> Dalam sistem seperti itu, proses penentangan yang dilakukan oleh para patron daerah dengan tidak mau menjual hasil komoditas yang dikuasainya ke negara terjadi secara nyata. Apalagi jika kita memahami bahwa di tengah ketidaksolidan internal yang terjadi, muncul pula sekelompok elite patron dari ‘kalangan selatan’ dengan modal rente ekonomi kuat berkat jejaring patronasenya bersama dengan para

12 Sejak era 1960-an melalui kepemimpinan Partai Laodong, Vietnam telah menerapkan sistem fiskal berbasis pendapatan daerah yang bersifat subsidi silang. Dengan model fiskal seperti ini, makin kaya suatu daerah maka makin besar jumlah setoran dan jatah yang diterima makin kecil. Sebaliknya, jika makin miskin maka jumlah uang yang disetorkan makin kecil, dan jatah yang diterimanya makin besar (Jandl dalam London 2014, 70-71).

13 Pada masa peperangan, Partai Laodong banyak mengakomodasi para tuan tanah (*ly dich*) di daerah untuk mengisi jabatan-jabatan sekelas Sekjen Partai Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam sistem yang ‘*fused troika*’ (Gubernur/walikota – ketua dewan rakyat daerah – Sekjen Partai). Karena strategis, jabatan ini dianggap setara dengan Menteri/Komisaris (pemimpin departemen Partai Lao Dong) pusat (Ffode ed.1997, 149).

pengusaha lokal era RSV.<sup>14</sup> Dengan besarnya produksi komoditas dan akses distribusi ekspor-impor melalui pelabuhan yang dimiliki, selain mampu menciptakan ‘pasar gelap’ yang menyedot komoditas dari sentra-sentra perekonomian di berbagai daerah dengan harga jual yang lebih tinggi dari yang ditetapkan negara, mereka juga mampu secara politis menantang kekuatan kroni Le Duan dan Le Duc Tho yang berkuasa di pusat.

Seperti halnya yang terjadi dalam Kongres ke-6, pada saat pencetusan *Doi Moi*, dapat dilihat bahwasanya di balik keputusan PKV pada tahun 1986 untuk mengganti sistem perekonomiannya menjadi ‘*socialist market economy*’ melalui mekanisme *New Economic Zones*, terdapat sebuah motif politik para elite patron partai dari kawasan selatan untuk bisa menggulingkan keberadaan kelompok kroni Le Duan dan Duc Tho dari puncak kekuasaan. Dengan mengorkestrasikan dukungan para elite patron tingkat daerah yang merasa diuntungkan dengan pasar gelap yang dikelola mereka, niatan politis sejumlah ‘elite selatan’ yang merupakan mantan pimpinan Vietcong seperti Nguyen Van Linh,<sup>15</sup> dan Vo Van Kiet<sup>16</sup> itu terlihat berhasil terwujud melalui sebuah gerakan yang diberi tajuk ‘*criticism-self criticism*’.

Dengan gerakan itu, para ‘elite selatan’ tidak hanya berhasil menggerus sisa-sisa kekuatan kroni Le Duan dan Le Duc Tho di Pemerintahan Pusat yang terus menerus mencoba pengambil alih aset rente ekonomi yang dimiliki mereka.<sup>17</sup> Hal ini juga memun-

---

14 Menurut Riedel dan Turley (1999, 18), hubungan patronase yang dilakukan oleh sejumlah elite partai komunis Vietnam dengan sejumlah pengusaha asal kota Ho Chi Minh sebenarnya telah terjadi pada masa gerilya perang Indochina II.

15 Nguyen Van Linh, seorang Sekjen PKV yang dipilih dalam Kongres 1986 adalah mantan Sekjen Partai Kota Ho Chi Minh (Saigon) yang selama menjabat telah memposisikan dirinya sebagai seorang pendulang rente ekonomi bersama dengan sejumlah pengusaha lokal dengan mendirikan sejumlah perusahaan agrikultur dan ekspor-impor bersifat ‘*joint state-private company*’ (Riedel dan Turley 1999).

16 Vo Van Kiet, mantan elite Vietcong yang pada masa unifikasi menduduki jabatan Wakil Perdana Menteri, merupakan rekan Van Linh yang sama-sama berasal dari Ho Chi Minh. Meski sama-sama mendukung keberlakuan sistem ekonomi privat, Ia tidak menunjukkan sikap sekeras seperti Van Linh sehingga dapat tetap aman dari kekuatan kelompok Le Duan dan Le Duc Tho. (New York Times 2008).

17 Jika kita membaca catatan sejarah yang diberikan oleh Riedel dan Turley (1999), kiranya kita akan melihat bukti kuat dari gejala pengambilalihan aset-aset tersebut melalui kasus ditanamkannya orang-orang Le Duc Tho ke dalam Bank RSV cabang kota Saigon dan ketua NA kota

culkan skema *diffused troika* Vietnam dalam ekuilibrium baru dengan makin meninggikan derajat kekuasaan politik Perdana Menteri untuk melaksanakan program-program pemerintahan secara relatif lebih independen dari tangan Sekjen. Pada awalnya, kalangan ilmuwan sempat memprediksi upaya reformasi lembaga yang dilakukan Van Linh akan berhenti ketika Do Muoi dari kawasan utara terpilih menggantikan Van Linh sebagai Sekjen pada Kongres ke-7 tahun 1991. Akan tetapi, justru pada era kepemimpinan Do Muoi, PKV malah memunculkan konstitusi baru bagi Vietnam untuk lebih mengakselerasi *Doi Moi* dengan cara meningkatkan keleluasaan konstitusional Perdana Menteri untuk menjalankan kuasa pemerintahan (Mason dan Mason 1997, 313).

Selain menghilangkan format kelembagaan negara ala presidium Soviet, dan memperbolehkan orang-orang nonpartai menduduki kursi NA (Khng 1992), konstitusi baru yang lahir melalui Sidang NA pasca-Kongres 1991 itu juga terlihat lebih meminggirkan kekuasaan Presiden dari urusan-urusan politik dan membuat keberadaan PM menjadi sosok vital. Selain memiliki kewenangan strategis di bidang ekonomi<sup>18</sup>, PM juga memiliki kewenangan politis besar seperti (1) mengarahkan People's Council (NA di tingkat provinsi) untuk menciptakan kebijakan dan lembaga pemerintah daerah, (2) mengawasi kerja pemerintahan dan memerangi korupsi, serta (3) mengonsolidasikan pertahanan nasional dari masyarakat.<sup>19</sup> Dengan kewenangan strategis itu, tidak mengherankan jika kemudian sosok-sosok elite Perdana Menteri Vietnam seperti Nguyen Tan Dung, Vo Van Kiet, Phan Van Kai, termasuk juga Do Muoi, dapat selalu muncul ke panggung pemilihan Sekjen dalam beberapa kali Kongres era *Doi Moi* dengan membawa gerbong dukungan klientelisme dari kalangan birokrat, pejabat BUMN, hingga pengusaha Vietnam (Gainsborough 2007).

---

Ho Chi Minh pada saat unifikasi. Hal yang tentu saja amat dikhawatirkan para elite patron selatan bersama dengan rekanan pengusahanya.

18 Lihat dalam Pasal 114 ayat 2 konstitusi 1992 yang mengatakan: "To undertake unified management of the building up and development of the national economy implement the national financial and monetary policies." (Socialist Republic of Vietnam 1992).

19 Pasal 112 dan 114 (*ibid.*)

Apabila kewenangan politik menjadi ukuran maka skema difusi troika Vietnam pada era *Doi Moi* akan selalu memperlihatkan keberadaan Sekjen, Perdana Menteri, dan Presiden secara berturut-turut dalam struktur hierarki yang relatif dinamis dengan mempertimbangkan faktor perimbangan kekuatan patron dari ketiga kawasan Vietnam (utara, tengah, dan selatan) dan citra ‘anti korupsi’. Dalam konteks ini, analisis kasus ketidakterpilihan Nguyen Tan Dung (Perdana Menteri Vietnam 2006-2016) menjadi Sekjen dalam dua Kongres berturut-turut (2011 dan 2016) akibat skandal korupsi yang membelit kelompok kroni pendukungnya dapat menjadi contoh. Dengan demikian, keberadaan pola sirkulasi patron di jabatan troika PKV tidak hanya didasari oleh alasan perimbangan kuasa patron per wilayah, tetapi juga kekhawatiran akan kembalinya rezim PKV menjadi seperti pada masa Le Duan sebelumnya. Apalagi setelah diketahui, jejaring kuasa patronase yang dimiliki Tan Dung berkat jabatan strategisnya sebagai perdana menteri 2 periode telah mencengkram berbagai akses pendulang rente ekonomi yang strategis bagi para elite partai, termasuk di antaranya BUMN besar seperti Petro-Vietnam (seperti Pertamina di Indonesia).<sup>20</sup>

Dengan demikian, untuk memahami mengapa Nguyen Phu Trong dapat terpilih sebagai Sekjen secara berturut-turut pada Kongres PKV ke-11 dan ke-12 pada tahun 2011, kita dapat melihat faktor-faktor lain. Agaknya, hal tersebut sangat berkaitan dengan persoalan kasus korupsi yang membelit calon kandidat lawan, yakni Nguyen Tan Dung. Sebab, selain dapat dibuktikan dari usia Nguyen Phu Trong yang pada saat dua Kongres tersebut sebenarnya telah melebihi ambang batas aturan yang ditetapkan.<sup>21</sup> Sosok Nguyen Phu Trong yang lebih nampak berciri akademisi ketimbang politisi itu dinilai sebagai pribadi sepuh yang paling banyak bisa diterima oleh para kelompok elite patron yang bermain di PKV saat ini (Schuler dan Ostwald 2016, 3). Akibatnya, walaupun saat

---

20 Lihat bagaimana pengaruh skandal korupsi di BUMN Vietnam, PetroVietnam terhadap ketidakterpilihan Nguyen Tan Dung dan beberapa calon politibiro Partai lain pada Kongres 2016 (Le 2017).

21 Pada masa *Doi Moi*, batas usia Politibiro dan Sekjen dalam kongres PKV sebenarnya merujuk pada batas usia maksimal kandidat anggota CC yang maksimal 55 tahun bagi kandidat baru dan 60 tahun bagi kandidat petahana (Malesky, Abrami dan Zheng, 2011, 41).

ini tengah terjadi ‘pemberangusan’ kekuatan patronase Dung oleh Sekjen yang mulai mendapatkan kewenangan untuk menangani korupsi secara langsung sejak Kongres ke-11, stabilitas politik di lingkungan internal akan relatif tetap terjaga lebih baik. Berbagai kelompok patron, termasuk kelompok Dung, bisa memaklumi tindakan yang dilakukan Phu Trong karena tidak didasari oleh motif patrimonialisme kuat seperti yang pernah dimunculkan Le Duan dulu.

### *Penguatan Komite Sentral atas Politbiro*

Meski secara struktural semua partai komunis berkuasa menempatkan keberadaan lembaga Komite Sentral di atas politbiro (Comintern 1921), bukan berarti semua partai komunis tersebut bisa secara ‘riil’ membuat politbiro bertanggung jawab kepada CC-nya. Sebagaimana dicontohkan Partai Komunis China (PKC), biasanya ada beberapa macam modifikasi kelembagaan yang dilakukan agar Politbiro partai menjadi tidak mendapatkan ‘veto’ dari CC-nya. Contohnya adalah dengan menciptakan badan lain di atas Politbiro seperti Politbiro Standing Committee (PBSC) yang lebih sedikit anggotanya, namun banyak melakukan pertemuan, dan melemahkan keberadaan CC melalui aturan *Inner-Party Supervision*<sup>22</sup> dan membatasi jumlah sidang pleno yang dilakukan CC sebanyak maksimal dua kali setahun (Li 2012, 28), serta pelarangan mekanisme *self-nomination* (pencalonan diri sendiri) dalam proses pemilihan anggota CC dalam Kongres (Abrami, Malesky, dan Zheng 2013, 267).

Sementara itu, jika kita memerhatikan pola hubungan antara CC dan Politbiro dalam PKV sejak *Doi Moi*, kondisinya jelas sangat berbeda. Meski sama-sama mengenal format diferensiasi anggota CC berdasarkan pengalaman menjadi anggota tetap (dengan hak suara) dan anggota alternatif (tidak memiliki hak suara) (Bao 2007, 300), keberadaan CC PKV terlihat lebih unggul dibandingkan CC PKC secara kuantitatif dan kualitatif. Jika keunggulan kuantitatif CC PKV atas

---

<sup>22</sup> *Inner-Party Supervision* adalah sebuah aturan supervisi yang dikeluarkan Politbiro bagi para kandidat anggota CC yang berasal dari sekjen-ketua partai tingkat daerah agar tidak memiliki sikap yang bertolak belakang dengan kepentingan pusat.

PKC dapat dibuktikan dari dua hal, yaitu: (1) lebih seringnya CC PKV mengadakan sidang pleno tahunan, dan (2) dokumen legislasi yang dihasilkan oleh CC PKV lebih banyak digunakan menjadi dokumen kenegaraan dibandingkan CC PKC. Sementara secara kualitatif, keunggulan tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa contoh kasus proses veto yang dilakukan oleh CC PKV terhadap kebijakan Politbironya seperti pembubaran lembaga PBSC yang diajukan Politbiro pada Kongres ke-9 tahun 1996, dan penolakan CC terhadap usulan pencalonan Le Kha Phieu sebagai Sekjen oleh Politbiro pada Kongres tahun 2001 (Abrami, Malesky, dan Zheng 2013, 252-253).

Namun demikian, keberlakuan sistem sentralisme demokratik PKV tersebut sudah pasti bukan tanpa proses. Jika dilihat dari proses sirkulasi patron yang berjalan, penguatan CC PKV seperti ini sebenarnya lagi-lagi tidak dapat dipisahkan dari gerakan politik kelompok 'patron selatan' pada masa pencetusan *Doi Moi*. Hal itu terjadi karena upaya sirkulasi paksa terhadap kelompok kroni Le Duan dan Le Duc Tho yang dipimpin Nguyen Van Linh ternyata mengikutsertakan proses konsolidasi para elite patron daerah yang merasa kecewa dengan pola kepemimpinan pusat. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Sekjen *ad interim* Truong Chinh<sup>23</sup> maka upaya konsolidasi tersebut dilakukan melalui jalur kelembagaan. Dengan memanfaatkan jabatan strategis di Sekretariat Politbiro yang diberikan padanya melalui Sidang Pleno CC ke-8 pada bulan Juni tahun 1985, strategi sirkulasi yang dilakukan Nguyen Van Linh pun dilakukan dengan cara memasukkan kelompok-kelompok pendukungnya ke dalam Kongres tahun 1986.

Selain membatasi usia delegasi menjadi maksimum 49 tahun dan memiliki pengetahuan akan ekonomi privat, beberapa aturan ciptaan Van Linh yang terlihat benar berinisiatif merontokkan kekuatan Kroni Le Duan dan Le Duc Tho dapat dilihat dari usulannya kepada CC untuk menambah lagi persentase keterwakilan provinsi di keanggotaan

---

23 Dalam periodisasi jabatan Sekjen, Truong Chinh, seorang elite PKV yang merupakan *protégé* (mentee) langsung Ho Chi Minh, sempat menjabat sebagai Sekjen PKV *ad interim* selama 5 bulan (Juli – Desember 1986) untuk menggantikan posisi Le Duan sebelum Nguyen Van Linh terpilih dalam Kongres ke-6 yang diadakan pada 18 Desember 1986.

CC pada Kongres 1986 menjadi 41% dari total 173 orang.<sup>24</sup> Meski kemudian para anggota CC baru itu hanya diberi status sebagai anggota alternatif, menurut catatan Abrami Malesky dan Zheng, keberadaan 49 orang anggota alternatif baru itu tampak lebih dari cukup untuk berhasil membuat CC PKV pada Kongres Desember 1986 memenangkan Van Linh sebagai Sekjen dan program *Doi Moi* rancangannya (Riedel dan Turley 1999, 18-20).

Dinamika perilaku politik para elite dari selatan terlihat makin menguat dalam Kongres ke-7 pada tahun 1991. Jika diperhatikan, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Nguyen Van Linh dan Vo Van Kiet sebelum Kongres itu dimulai, seperti membuat CC menerima usulan mereka untuk status anggota tetap kepada seluruh anggota alternatif CC Kongres 1986 dan menambah lagi jatah keterwakilan CC asal provinsi menjadi sebanyak 60% dari total 143 orang (Malesky 2009, 136-143). Dengan upaya kelembagaan tersebut maka Vo Van Kiet berhasil mendapatkan posisi ketiga teratas di Politbiro hingga jabatan Perdana Menteri pada periode NA 1992. Terlepas dari negosiasi politik apa pun yang dimunculkan para patron sehingga Do Muoi yang berasal dari Utara bisa terpilih menjadi Sekjen, upaya sirkulasi kekuasaan patron berbasis CC yang dijalankan oleh Van Linh dan Van Kiet di sepanjang dua kali pelaksanaan Kongres 1986 dan 1991 tampak telah menciptakan sebuah preseden politik tersendiri yang berdampak pada makin kuatnya daya tawar CC di dalam PKV.

Melalui contoh kasus Kongres ke-9 tahun 2001, terlihat bahwa setiap ada upaya untuk melemahkan kekuasaan CC maka penentangan terhadapnya pun akan datang. Cerita mengenai ini dimulai pada bulan Januari 1996 ketika Sekjen Du Moui yang terpilih pada Kongres ke-7 mengajukan sebuah draf perubahan statuta partai ke pleno CC yang berisi pendiri sebuah lembaga yang mirip dengan PBSC PKC dengan keanggotaan tiga orang troika Vietnam dan dua kader Politbiro junior. Adapun masing-masing anggota diberi tugas mengurus bidang-bidang

---

<sup>24</sup> Dalam Kongres ke-6, Pembatasan usia delegasi kongres asal daerah adalah: (1) provinsi: 40-49 tahun, (2) kabupaten/kota: 30-39 tahun (Stern, *op. cit.*, hlm. 361).



strategis seperti pertahanan-keamanan, pembangunan ekonomi, kebijakan luar negeri, dan pembangunan partai.

Akan tetapi, pada saat Kongres ke-8, CC PKV kemudian menggugat keberadaan PBSC. Selain karena keanggotaan PBSC tidak dipilih oleh Komite Sentral, menurut CC, PBSC juga dapat melemahkan dirinya. Meski tidak sepenuhnya dibubarkan, Sidang Pleno I Kongres ke-8 tersebut memutuskan untuk memodifikasi badan PBSC Politbiro inisiatif petahana menjadi sebuah lembaga yang hanya ditugaskan melaksanakan fungsi-fungsi internal seperti keuangan dan birokrasi partai. Tanpa sama sekali mengikutsertakan isu-isu strategis kenegaraan seperti yang disampaikan pada usulan Politbiro, Kongres juga menyepakati bahwa lembaga PBSC PKV hanya boleh diisi oleh para anggota anggota Politbiro yang tidak menjadi bagian dari pemerintahan (Kolko 1997, 147). Maka dengan sifatnya yang amat terbatas itu, Kongres ke-9 yang dilaksanakan pada 2001 pun lantas memutuskan untuk mengakhiri keberadaan PBSC dengan memasukkan gugus tugas yang diembannya kepada lembaga sekretariat. Lembaga ini merupakan lembaga yang tidak terlalu strategis karena isu-isu yang dibahas di dalamnya hanya menyangkutpautkan keuangan dan birokrasi partai sebagaimana yang diamanatkan oleh Kongres ke-8 (Thayer 2002, 83-84).

### *Peningkatan Kompetisi dalam Pemilihan Anggota CC*

Selain memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan Politbiro, CC di dalam PKV juga terlihat memiliki sistem pemilihan anggota yang kompetitif. Dengan memerhatikan aspek prosedur penominasian, kompetisi antarkandidat, dan representasi provinsi, pemilihan anggota yang berlangsung di dalam CC PKV tampak terlihat konsekuensi memunculkan prinsip akuntabilitas horizontal. Hal yang belum tentu bisa dilaksanakan oleh setiap partai Komunis di dunia yang berkuasa. Misalnya PKC, meski sama-sama mengenal prosedur pengajuan kembali anggota CC *incumbent* dan rekomendasi dari Politbiro, PKV memberlakukan prosedur *self-nomination* maupun *self-resignment* yang tidak diperbolehkan sama sekali dalam sistem pemilihan CC PKC. Selain itu, tidak seperti PKC yang menetapkan keikutsertaan delegasi

dalam Kongres berdasarkan rekomendasi Politbiro, sistem pemilihan delegasi Kongres yang dilakukan PKV sangat terlihat murni *bottom-up* karena sepenuhnya bergantung pada mekanisme pemilihan permulaan di masing-masing badan tempat delegasi tersebut berasal (Malesky, Abrami dan Zheng 2011, 411).

Jika dilihat dari proses pencalonan, keberadaan CC PKV juga terlihat lebih memainkan peran dibandingkan Politbironya. Tidak seperti PKC yang seluruh daftar kandidat yang disiapkan Politbiro tidak bisa diutak-atik, penetapan kandidat anggota CC PKV yang dilakukan melalui sidang pleno CC dalam rentang beberapa bulan sebelum Kongres sangat terlihat lebih terbuka. Selain mempertimbangkan faktor usia (maksimal 55 tahun bagi kandidat baru dan 60 tahun bagi kandidat petahana), daftar nama yang dihasilkan dalam sidang pleno CC juga bisa berubah apabila ada kandidat yang mengajukan pengunduran diri sebelum Kongres berlangsung. Atau sebaliknya, kandidat baru mengajukan diri/diajukan oleh para kader yang hadir menjadi delegasi Kongres (Malesky, Abrami dan Zheng. 2011, 411). Namun demikian, jika memerhatikan proses pemilihan anggota CC PKV yang berlangsung dalam Kongres yang dilakukan sejak *Doi Moi* 1986, keberadaan kompetisi dalam pemilihan anggota CC seperti itu sebenarnya baru muncul pada Kongres ke-9 yang dilaksanakan pada tahun 2001 sehingga menarik untuk dikaji mengapa baru pada Kongres ke-9 kompetisi seperti itu terjadi.

Dari sejumlah persoalan yang hadir melingkupi pelaksanaan Kongres ke-9, ada dua faktor kondisi politik penting yang terkait dengan adaptasi sirkulasi patron yang sangat mungkin mempengaruhinya, yaitu: *Pertama*, gejala gerontokrasi. Seiring dengan telah banyaknya para pejabat penting partai yang mengundurkan diri karena usia lanjut, para kader PKV yang lahir pada decade 1950-1960-an juga telah banyak yang mengisi jabatan-jabatan penting di pemerintahan maupun partai. Maka dengan mempertimbangkan situasi macam ini, kiranya tak heran jika para elite PKV memutuskan sudah saatnya menciptakan batasan usia di sistem pemilihan anggota CC agar dapat menciptakan efek regenerasi. Kendati aturan ini berhasil membuat seorang anggota Politbiro

petahana berusia 69 tahun bernama Nguyen Van An tersingkir dari proses pemilihan CC di tahun itu, akan tetapi sebagaimana yang ditampilkan oleh fenomena keterpilihan Pham Van Dong sebagai Perdana Menteri dan Nguyen Phu Tron sebagai Sekjen di usia yang melebihi aturan yang ditetapkan, PKV tampak masih memberikan toleransi kepada sejumlah kandidat anggota CC yang telah terlihat memiliki kecenderungan kuat untuk naik menjadi troika Vietnam.

Dengan memerhatikan secara seksama mengenai latar situasi keterpilihan troika berumur 60-an itu, akan dapat dipahami bahwa sebenarnya para elite PKV tidak ingin terlalu bergegas menciptakan perubahan besar. Dengan memperhitungkan kondisi bahwa pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah bentukan Kongres ke-8 pada 1996 yang tidak terlalu baik mengingat krisis ekonomi Asia 90-an dan berbagai skandal korupsi yang melanda (Abuza 2002, 1) maka akan berbahaya bagi para elite PKV jika harus melepaskan gerontokrasi begitu saja mengingat jasa-jasa yang diberikan para elite 'senior' tersebut dalam menyatukan Vietnam bisa membantu mereka meningkatkan kadar legitimasi negara partai yang sedang turun. Apalagi jika memahami bahwa bahwa Nong Duc Manh yang terpilih menjadi Sekjen pada Kongres ke-8 dan ke-9 adalah anak dari Ho Chi Minh.<sup>25</sup>

*Kedua* adalah upaya perbaikan hubungan elite pusat-daerah. Paham bahwa kedudukan para elite partai di daerah pasca-*Doi Moi* cenderung menguat dan bisa membahayakan jika tidak ditertibkan maka – selain meningkatkan persentase keterwakilan mereka di dalam badan CC menjadi 41% (dari lima tahun sebelumnya hanya 31,2%) dan memilih Sekjen Nong Duc Manh yang berasal dari etnik minoritas Tay<sup>26</sup> – para elite PKV juga berpikir bahwa sudah saatnya menciptakan sistem pemilihan yang kompetitif dengan harapan proses pembangkangan

---

25 Meski Nong Duc Manh membantah dalam biografinya, akan tetapi berbagai media massa lokal hingga internasional telah banyak menyiarkan kabar mengenai isu bahwa ia adalah anak Ho Chi Minh. (BBC News, 2001).

26 Etnik Tay adalah etnik minoritas yang banyak tinggal di kawasan *Tonkin* Vietnam. Dalam sensus yang dilakukan 2009, jumlah penduduk Vietnam beretnik Tay adalah sebesar kurang lebih 1,7 juta jiwa atau berposisi kedua dari segi jumlah jika dibandingkan dengan etnik *Viet (Kinh)* yang berjumlah 73 jutaan jiwa. (Central Population and Housing Census Steering Committee of Vietnam 2009, 134).

mereka akan menjadi semakin berkurang. Hal ini dilakukan dengan memerhatikan hasil analisis Abuza dan Malesky mengenai fenomena tidak terpilihnya Sekjen *incumbent* Le Kha Phieu (lawan Nong Duc Manh) pada Kongres ke-9 akibat serangan balik para patron daerah di dalam CC terhadap Lee yang melakukan pemecatan ribuan kader partai daerah tersangka suap/korupsi pada periode kepemimpinannya. Kiranya akan sangat berbahaya bagi PKV apabila geliat peningkatan kekuatan lokal yang terjadi pada masa itu tidak dibarengi penguatan kelembagaan yang mampu mengontrolnya. Apalagi setelah memahami bahwa di tengah maraknya tuntutan pemekaran wilayah provinsi baru di Vietnam sejak 1990an yang datang dari para patron daerah (Malesky 2009, 136-137), para elite troika pusat yang muncul sejak masa ini juga rata-rata merupakan bekas teknokrat negara sentralisme-birokratik era Le Duan yang tidak pernah bisa membangun jejaring klientelismenya ke daerah-daerah secara luas (Abuza 2002, 125-126).

Akan tetapi, kiranya kita perlu menggarisbawahi pula bahwa konsolidasi klientelisme berbasis desentralisasi yang diciptakan melalui pemilihan anggota CC Kongres ke-9 tidak bisa dikatakan sepenuhnya statis demi kemenangan patron daerah. Apabila kita mencontoh kasus pemecatan hingga pemenjaraan yang dilakukan oleh para sekjen-sekjen PKV selanjutnya (Nong Duc Manh, pada 2006, dan Nguyen Phu Trong, 2011-2016) terhadap para kandidat anggota CC daerah sebelum Kongres (BBC News 2006; Le 2017), kedua sekjen tersebut juga masing-masing melakukan melaksanakan pola-pola pendisiplinan kader berbasis koersi seperti yang dilakukan Lee Kha Phieu dulu.

### *Rivalitas Blok Voting dalam CC*

Indikator keempat yang tak kalah penting untuk memahami proses sirkulasi patron dalam pelaksanaan sentralisme demokratik PKV *Doi Moi* adalah rivalitas blok voting di dalam CC. Dengan mencuplik penjelasan Malesky mengenai keberadaan blok voting di dalam tubuh CC antara kubu konservatif (yang bergantung pada keberadaan BUMN) dan kubu reformis (yang tidak bergantung kepada BUMN), dapat dipahami bahwa kecenderungan dinamika politik yang terjadi di badan

CC pada masa *Doi Moi* tidaklah mengarah kepada penguatan atau dominasi dari salah satu pihak. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam Tabel 3 di bawah, kekuatan konservatif di dalam tubuh CC pada tahun 1991 tampak mendominasi dengan selisih 15% namun perbandingan perolehan kursi kedua kelompok dalam 4 Kongres yang berlangsung pada era *Doi Moi* berangsur-angsur menemui selisih tipis dengan hanya memunculkan kemenangan 3,8% bagi kubu reformis.

Tabel 3  
Pembagian blok voting dalam CC PKV periode Kongres 1991-2006

No	Blok Voting	Jumlah dalam Kongres Partai (%)			
		1991	1996	2001	2006
<b>Koalisi Konservatif</b>					
1	Berposisi hanya di Partai	16.44	10.12	10.9	16.57
2	Kementerian yang mendapat keuntungan BUMN	13.7	7.74	7.69	2.21
3	Militer	10.96	12.5	11.54	14.92
4	Provinsi yang diuntungkan oleh BUMN	15.07	20.24	12.82	12.71
5	Manajer BUMN	1.37	3.57	2.56	1.66
Jumlah		57.54	54.17	45.51	48.07
<b>Koalisi Reformis</b>					
1	Kementerian yang tidak memperoleh keuntungan dari BUMN	21.92	30.95	30.77	18.78
2	Provinsi yang tidak diuntungkan oleh BUMN	20.55	14.88	23.72	33.15
Jumlah		42.47	45.83	54.49	51.93
Total Anggota Komite Sentral		146	169	156	160

Sumber: Malesky 2009, 137.

Hanya saja, tulisan ini perlu memberikan catatan kritis mengenai tabel di atas mengingat data-datanya jelas tidak dapat merepresentasikan kebenaran dalam CC secara utuh. Gerak dinamika politik yang berkembang kekinian sulit untuk melabeli keanggotaan CC menjadi dualis seperti itu. Ada beberapa faktor yang dapat membuat ikatan di dalam kedua kelompok tersebut menjadi longgar/fleksibel, seperti perilaku koruptif elite dan sikap kompromi elite atas tuntutan kebutuhan ekonomi Vietnam. Secara kasuistis, penjelasan atas keduanya disajikan sebagai berikut.

*Pertama*, soal perilaku koruptif elite. Mungkin kita bisa memahami bahwa jika Malesky memasukkan Kementerian Transportasi dan Kementerian Pembangunan Infrastruktur ke dalam blok voting kelompok konservatif adalah karena dua kementerian ini masih terlihat memiliki koneksi terhadap BUMN-BUMN yang sahamnya masih dikuasai 100%

oleh pemerintah seperti bidang manajemen bandara, infrastruktur dan lain sebagainya. Akan tetapi, sebagaimana yang dicontohkan melalui kasus korupsi biro PMU-18 yang bernaung di bawah Kementerian Transportasi, nyata bahwa dana sebesar kurang lebih 2 miliar dolar AS yang dikorupsi oleh kementerian ini adalah berasal dari bantuan luar negeri, seperti Jepang, Uni Eropa, dan World Bank (BBC News 2006). Dengan memasukkan data-data sidang peradilan terhadap elite-elite kepolisian, serta para pejabat partai tingkat provinsi dari daerah-daerah utara di sekitaran Hanoi yang dilalui oleh proyek PMU-18<sup>27</sup> maka kemudian apakah mungkin untuk mengelompokkan elite-elite pro-BUMN seperti 'kubu utara' yang selama ini dikenal konservatif sebagai elite yang juga menolak dana asing. Sementara itu, pengungkapan skandal korupsi BUMN PetroVietnam yang baru-baru ini muncul di media, justru nampak mencuatkan nama-nama 'elite selatan' asal Kota Ho Chi Minh – yang selama ini dikenal sebagai motor penggerak kelompok reformis dalam CC – menjadi bagian dari kelompok yang ikut diuntungkan oleh keberadaan BUMN Vietnam (Forbes 2017).

*Kedua*, soal perubahan sikap elite konservatif. Seperti halnya yang ditunjukkan oleh para 'elite utara' seperti Le Duan dan Truong Chinh pada momen-momen menjelang Kongres ke-6, kiranya akan dapat diambil kesimpulan bahwa sekeras-kerasnya sikap elite PKV mempertahankan sistem ekonomi pusat demi menjaga kedudukan para 'protégé'-nya di dalam partai, namun jika hal tersebut telah berdampak pada krisis legitimasi partai maka keputusan yang diambil adalah memenangkan pilihan yang lebih mulia. Jika pada kasus Le Duan dan Truong Chinh, hal tersebut dapat dibuktikan dari dimasukkannya kembali Nguyen Van Linh dan seluruh elite provinsi ke dalam Politbiro dan CC yang melakukan *Doi Moi* setelah sebelumnya mereka semua dikeluarkan setelah Kongres 1982 maka pada saat ini, hal tersebut dapat terlihat tegas dari perubahan sikap yang dimunculkan para elite konservatif PKV pada

---

27 Dalam perkembangan pengungkapan kasus PMU 18 selanjutnya pada awal tahun 2017 terungkap adanya aliran dana korupsi kepada sejumlah elite polisi dari kota Hanoi (*Vietnam Breaking News.com* 2017).

tahun 2000-an untuk menyuntik modal BUMN yang pada tahun 1986 tidak ikut terkena proses reformasi (Riedel dan Turley 1999, 18-19).

Jika diperhatikan, perubahan sikap kelompok konservatif untuk melepas lumbung pencari rentenya sangat jelas disebabkan oleh faktor tuntutan ekonomi Vietnam. Dengan mempertimbangkan krisis moneter Asia<sup>28</sup> serta kebangkrutan BUMN-BUMN Vietnam pada tahun 1996-1997 akibat korupsi dan salah kelola yang dilakukan oleh kelompok mereka sendiri (Fforde 2004, 3) maka tidak ada pilihan lain bagi kelompok konservatif untuk menyerah dan memilih program penyuntikan modal BUMN dari dana asing sebagai jalan keluar. Apalagi, tawaran dana jutaan dolar Amerika dari Bank Dunia, IMF, dan Asian Development Bank (ADB) juga telah menunggu bila Vietnam setuju untuk melaksanakan *Doi Moi 2* dengan melepas BUMN dan melonggarkan kembali tarif impornya.<sup>29</sup> Meski memang pemimpin kelompok konservatif pilihan Kongres 1991, Do Muoi menolak dengan tegas desakan-desakan internasional itu. Akan tetapi pada masa Kongres 1998, Sekjen Lee Ka Phieu dari kelompok militer (yang dalam kriteria Malesky masuk sebagai bagian dari blok voting konservatif) malah terlihat menjadi elite pengusung *Doi Moi 2* pada awal tahun 2000-an yang memprivatisasi BUMN hingga bergabung ke World Trade Organization (Elliot 2012, 189-191).

## KESIMPULAN

Dari seluruh uraian yang disampaikan, akan disadari bahwa dugaan banyak kalangan ilmuwan yang menganggap bahwa fenomena keber-tahanan negara komunis satu partai Vietnam selama ini didasari oleh logika berpikir sentralisme birokratik adalah salah. Karena jelas, mereka

28 Laju krisis ekonomi yang paling dirasakan Vietnam adalah penurunan pertumbuhan ekonomi Vietnam dari kisaran 7-9% menjadi 5%, serta penurunan dana bantuan asing (FDI) kepada Vietnam dari 7.7 miliar dolar menjadi hanya 3.5 miliar dolar pada tahun 1998 (Shakya 2006, 23).

29 Menurut catatan Shakya (*op. cit.*, hlm. 25), masing-masing dana yang diberikan oleh ketiga lembaga itu kepada Vietnam atas diselenggarakannya *Doi Moi 2* adalah sebagai berikut: (1) IMF, pada tahun 1997 sebesar 2.2 miliar dolar AS dan sebesar 400 juta dolar AS pada tahun 2001, (2) World Bank, melalui program *Poverty Reduction Support Credit (PRSC)* sebesar 250 juta dolar AS pada tahun 2001, (3) ADB, melalui program *Microfinance Sector Legal Framework* memberikan FDI sebesar 600 ribu dolar AS pada tahun 2000.

seperti memiliki mekanisme sentralisme demokratik tersendiri yang terbentuk secara historis dalam proses institusionalisasi partai dan diadopsi oleh para elitnya menjadi sebuah aturan main dalam Kongres. Dengan demikian, Vietnam bukan cuma tidak bisa disamakan dengan negara komunis lain, tetapi tulisan ini juga menduga kuat bahwa keberadaan negara satu partai ini masih akan berlangsung lama. Karena sebagai satu-satunya unit politik dalam sistem, PKV terlihat mampu menciptakan institusi politik pada era *Doi Moi* yang mampu mengakomodasi tuntutan reformasi dan kepentingan para patron yang semakin lama semakin bermain secara pragmatis di dalamnya.

Meski tidak mampu menghadirkan kebijakan secara lebih efektif, PKV secara institusional justru terlihat lebih maju dalam melaksanakan nilai-nilai akuntabilitas dibandingkan partai-partai komunis lain yang masih berkuasa saat ini. Hal tersebut dilakukan dengan melaksanakan prinsip 'sentralisme demokratik' secara lebih konsekuen dalam tiap Kongresnya. Selain dapat dilihat secara horizontal melalui sifat elastisitasnya untuk bisa mengakui unsur-unsur partikularitas ke dalam lembaga representatif tertinggi seperti Kongres, secara vertikal hal tersebut juga dapat dilihat dari munculnya berbagai mekanisme '*check and balance*' dan '*bottom-up control*' dalam partai seperti difusi troika, kompetisi pemilihan anggota CC, dan rivalitas blok voting guna menstabilkan permainan para patron yang ada di dalamnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrami, Regina, Edmund Malesky dan Yu Zheng. 2011. "Institutions and Inequality in Single-Party Regimes: A Comparative Analysis of Vietnam and China." *Comparative Politics* 43 (4): 401-419.
- Abrami, Regina, Edmund Malesky dan Yu. 2013. "Vietnam through Chinese Eyes." dalam *Why Communism Did Not Collapse: Understanding Authoritarian Regime Resilience in Asia and Europe*, ed. Martin K. Dimitrov, Cambridge: Cambridge University Press, 237-275.



- Abuza, Zachary. 2002. "The Lessons of Le Kha Phieu: Changing Rules in Vietnamese Politics." *Contemporary Southeast Asia* 24 (1): 121-145.
- Bo, Zhiyue. 2007. *China's Elite Politics: Political Transition and Power Balancing*. Singapore: World Scientific Publishing.
- BBC News. 2001. "Vietnam Confirms Party Supremo Ousted." 19 April. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1284845.stm> (30 Oktober 2017).
- BBC News. 2006. "Crisis Dogs Vietnam Congress." 18 April. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4917466.stm> (20 Oktober 2017).
- Bordiga, Amadeo. 1926. "Draft Theses for the 3rd Congress of the Communist Party of Italy Presented by the Left (The Lyons Theses, 1926)." <https://www.marxists.org/archive/bordiga/works/1926/lyons-theses.htm> (13 Juni 2017).
- Bottomore, Tom (Ed.). 2001. *A Dictionary of Marxist Thought*. Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Brown, Archie. 2009. *The Rise and Fall of Communism*. New York: HarperCollins.
- Bui, Thiem Hai. 2014. "Elections in a Communist Party Regime: Vietnam's Electoral Integrity Reforms and Challenges." The Australian Political Studies Association Annual Conference, University of Sydney Paper. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2440088>.
- Central Intelligence Agency. 1956. *The Structure and Organizations of The Lao Dong Party of Viet Nam*. 1 April. <https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp78-00915r000400450005-3> (9 Agustus 2017).
- Chabal, Patrick, (Ed.) 1986. *Political Domination in Africa: Reflections on the Limits of Power*. Cambridge: Cambridge University.
- Cima, Ronald J. (ed.). 1989. *Vietnam: A Country Study*. Washington D.C.: Federal Research Division, Library of Congress.
- Comintern. 1921. "Guidelines on the Organizational Structure of Communist Parties, on the Methods and Content of Their Work. Adopted at the 24th Session of the Third Congress of the Communist International, 12 July 1921." <https://www.marxists.org/history/>

- international/comintern/3rd-congress/organisation/guidelines.htm (24 Oktober 2017).
- Diamond, Larry dan Leonardo Morlino. 2004. "The Quality of Democracy: An Overview." *Journal of Democracy* 15 (4): 20-31.
- Dimitrov, Martin K. 2013. *Why Communism Did Not Collapse: Understanding Authoritarian Regime Resilience in Asia and Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Elliot, David W.P. 2012. *Changing Worlds: Vietnam's Transition from Cold War to Globalization*. New York: Oxford University Press.
- Ffode, Adam (ed.). 1997. *Doi Moi: Ten Years after the 1986 Party Congress, Political and Social Change*. Canberra: Department of Political and Social Change, Research School of Pasific and Asian Studies. Australian National University.
- Fforde, Adam. 2004. "Vietnamese State-Owned Enterprises: 'Real Property', Commercial Performance and Political Economy." Southeast Asia Research Centre Working Paper Series 69, The City University of Hong Kong.
- Gainsborough, Martin. 2007. "From Patronage to "Outcomes": Vietnam's Communist Party Congresses Reconsidered. *Journal of Vietnamese Studies* 2 (1): 3-26.
- Gainsborough, Martin. 2010. *Vietnam: Rethinking the State*. London: ZedBooks.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. Terjemahan: Quintin, H. & Smith, GN. New York: International Publishers.
- Henisz, Witold J. 2000. "The Institutional Environment for Economic Growth." *Economics and Politics* 12 (1): 1-31.
- Hung, Nguyen Manh. 2016. "Continuity and Change under Vietnam's New Leadership." Perspective No. 50. ISEAS Yusof Ishak Institute. [https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS\\_Perspective\\_2016\\_50.pdf](https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2016_50.pdf) (30 Oktober 2017).
- Lam, Tran Dinh Thanh. 2006. "VIETNAM: Commissars Sidestep Corruption Issue." Inter Press Service News Agency. 27 April. <http://>

- [www.ipsnews.net/2006/04/vietnam-commissars-sidestep-corruption-issue/](http://www.ipsnews.net/2006/04/vietnam-commissars-sidestep-corruption-issue/) (30 Oktober 2017).
- Kabele, Jiri. 2008. "Sources of Governance Stability in Communist Regimes." *Polish Sociological Review* 162: 203-221.
- Kiervkiet, Benedict J. 2001. "An Approach for Analysing State-Society Relations in Vietnam." *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 16 (2): 238-278.
- Koh, David. 2001. "The Politics of a Divided Party and Parkinson's State in Vietnam." *Contemporary Southeast Asia* 23 (3): 533-551.
- Kolko, Gabriel. 1997. *Vietnam: Anatomy of a Peace*. London: Routledge.
- Klyvas, Stathis N. 1999. "The Decay and Breakdown of Communist One-Party Systems." *Annual Review of Political Science* 2 (1): 323-343.
- Le, Quynh. 2017. "Vietnam Sacks Top Official for PetroVietnam 'Violation'." BBC News. 8 Mei. <http://www.bbc.com/news/world-asia-39840943> (23 Oktober 2017).
- Li, Cheng. 2012. "Leadership Transition in the CPC: Promising Progress and Potential Problems." *China: An International Journal* 10 (2): 23-33.
- Malesky, Edmund. 2009. "Gerrymandering—Vietnamese Style: Escaping the Partial Reform Equilibrium in a Nondemocratic Regime." *The Journal of Politics* 71 (1): 132-159.
- Mason, Mike. 1997. *Development and Disorder: A History of the Third World Since 1945*. New Hampshire: University Press of New England.
- Moncrieffe, Joy Marie. 1998. "Reconceptualizing Political Accountability." *International Political Science Review* 19 (4): 387-406.
- Nappalos, Scott. 2013. *Democratic Centralism in Practice and Idea: A Critical Evaluation*. Johannesburg: Zabalaza Books.
- New York Times. 2008. "Vo Van Kiet, Reformer and Ex-Premier of Vietnam, Is Dead at 85." 12 April. <http://www.nytimes.com/2008/06/12/world/asia/12kiet.html> (28 Oktober 2017).
- Phuc, Nguyen Trong. 2014. *The Value of President Ho Chi Minh's Testament to the Present Party Building*. National Defence Journal. 19 September. <http://tapchiquptd.vn/en/theory-and-practice/the-value->

- of-president-ho-chi-minhs-testament-to-the-present-party-building/6250.html (5 Agustus 2017).
- Porter, Gareth. 1993. *Vietnam: The Politics of Bureaucratic Socialism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Riedel, James dan William S. Turley. 1999. "The Politics and Economics of Transition to an Open Market Economy in Vietnam." OECD Development Centre. Working Paper No. 152. <https://doi.org/10.1787/634117557525>.
- Russel Hiang Khng. 1992. "The 1992 Revised Constitution of Vietnam: Background and Scope of Changes." *Contemporary Southeast Asia* Volume 14 (3): 221-230.
- Schellhorn, Kaim. 1992. "Political and Economic Reforms in Vietnam." *Contemporary Southeast Asia* 14 (3): 231-243.
- Schuler, Paul dan Ostwald, Kai. 2016. "Delayed Transition: The End of Consensus Leadership in Vietnam?" Perspective No. 2. ISEAS Yusof Ishak Institute. [https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS\\_Perspective\\_2016\\_2.pdf](https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2016_2.pdf) (30 Oktober 2017).
- Scott, James C. 1972. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia." *The American Political Science Review* 66 (1): 91-113.
- Shakya, Yogendra Bahadur. 2006. "Grassroots Neoliberalism and The Reconstitution of Development in the 1990s: The Case of The Mainstreaming of The Microfinance Sector in Nepal and Vietnam." Disertasi tidak diterbitkan, University of Toronto, Toronto.
- Socialist Republic of Vietnam. 1992. *1992 Constitution of The Socialist Republic of Vietnam*. [http://www.vietnamlaws.com/freelaws/Constitution92\(aa01\).pdf](http://www.vietnamlaws.com/freelaws/Constitution92(aa01).pdf) (17 Oktober 2017).
- Socialist Republic of Vietnam Government Portal. 2016. *Political System*. <http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/TheSocialistRepublicOfVietnam/AboutVietnam> (20 September 2017).
- Tan, Jeremy. 2017. *Politicized Enforcement in Vietnam: Anti-Corruption Campaign Under CPV General Secretary Trong*. Forbes. 2 Agustus. <https://www.forbes.com/sites/riskmap/2017/08/02/politicized-enforcement-in-vietnam-anti-corruption-campaign-under-cpv-general-secretary-trong> (29 Oktober 2017).

- Thayer, Carlyle A. 2002. "Vietnam in 2001: The Ninth Party Congress and After." *Asian Survey* 42 (1) : 81-89.
- Thayer, Carlyle A. 2016. "Vietnam's Foreign Policy in an Era of Rising Sino-U.S. Competition: Providing Equity to the Major Powers While Pursuing Proactive Introduction International Integration." C3S Paper No. 0143. <https://www.c3sindia.org/archives/vietnams-foreign-policy-in-an-era-of-rising-sino-u-s-competition-providing-equity-to-the-major-powers-while-pursuing-proactive-international-integration-by-carlyle-a-thayer/> (29 Oktober 2017).
- Van Canh, Nguyen. 1983. *Vietnam Under Communism, 1975–1982*. California: Hoover Institution Press.
- Vietnam Breaking News.com. 2017. "New Developments in PMU 18 Corruption Scandal." 15 Januari. <https://www.vietnambreakingnews.com/2017/01/new-developments-in-pmu-18-corruption-scandal/> (28 Oktober 2017).
- Vietnam Central Population and Housing Census Steering Committee. 2010. *The 2009 Vietnam Populaton and Housing Census: Major Findings*. Hanoi: Central Population and Housing Census Steering Committee.
- Vietnam Law and Legal Forum. 2011. *Vietnam's 1980 Constitution*. 31 Maret. <http://vietnamlawmagazine.vn/vietnams-1980-constitution-4534.html> (23 Oktober 2017).
- Vu, Tuong. 2014. "Persistence Amid Decay: The Communist Party of Vietnam at 83." dalam *Politics in Contemporary Vietnam, Party, State and Authority Relations*, ed. Jonathan London. New York: Palgrave Macmillan, 21-41.
- Vuving, Alexander. 2010. "Vietnam: A Tale of Four Players." dalam *Southeast Asian Affairs 2010*, ed. Daljit Singh, Singapore: ISEAS, 367-389.
- Wallace, Matthew T. 2012. *Threats to The Hegemony of The Communist Party of Vietnam*. Tesis tidak diterbitkan. Ohio University, Ohio.
- White, Lynn (ed.). 2005. *Legitimacy: Ambiguities of Political Success or Failure in East and Southeast Asia*. New Jersey: World Scientific.

